

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA SUNGAI KERANJI

Oleh:

Ricka Akana ¹⁾, Sri Erlinda ²⁾, Zahirman ²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Riau

²⁾ Dosen Program Studi PPKn Universitas Riau

Email: akanarica@yahoo.com

Hp 082171758519

ABSTRACT

Authors raised the title " The Public of Perceptions About Leadership Head in moving the Village chief Public Participation in Development Process In Keranji Village River ", the formulation of the problem in this study is "How is the public perceptions of leadership in moving the village chief public participation in the development process in the Keranji village river". The purpose of this research is the following "to find out how people's perceptions of village leadership in moving the community participation in the development process in the Keranji Village River", while, the authors formulate hypotheses as the following: "The public perception of leadership in moving the village chief public participation in process of development in the village of River Keranji is not good". This study was conducted in February of 2013 until May 2013, while, the populations and samples in this study were all members of the community Keranji river life the amount of 2,450 souls. While, the sampling technique in this study Suharsimi Arikunto by her opinion, if a small population of 100 so all the population sampled, where as, if a large population of 100 can be taken between 10% -15% or 20% -25% or more. So that, the sample in this study was 10% of the total population of 2450 souls, and make the sample of 245 souls. In managing the data from the questionnaire that has been distributed to the respondent used descriptive qualitative method.

Based on the search result that the authors get good field through interviews and observation questionnaires received then hypotheses proposed in this study is acceptable is that the negative public perception of leadership in moving the village chief public participation in the development process in the village of River Keranji is not good. Based on, the percentage of responses 50.01% -100% =Good, 0%-50.01% =Not Good. Can be seen that the average percentage of respondents were above the benchmark. So that, the public perception of leadership in moving the village chief public participation in the development process in the village of River Keranji is already well.

Key words: Perception, Society, Head of Village, Development

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa harus

memikirkan bagaimana kondisi desa-nya. Salah satu cara adalah berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM (*Sumberdaya Manusia*) dan meningkatkan partisipasi masyarakat demi kemajuan desa. Langkah untuk mewujudkan harapan tersebut adalah suatu desa perlu memiliki pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang bijaksana tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat pedesaan. Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa.

Seiring berlakunya undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di desa. Persepsi masyarakat merupakan penafsiran atau anggapan yang ada dalam diri masyarakat dalam merespon suatu hal yang diterima dalam diri mereka atau lingkungannya terhadap kejadian yang terjadi, persepsi masyarakat memiliki hubungan terhadap sebuah partisipasi. Pembangunan di Desa Sungai Keranji memiliki kaitan yang erat terhadap anggapan yang ada dalam diri masyarakat tentang kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal. Partisipasi terbentuk apabila adanya keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan atau program yang diberikan oleh pemerintah, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat program dan rencana yang di berikan oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan harapan pemerintah.

Salah satu desa yang berada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ialah Desa Sungai Keranji, Masyarakat Desa Sungai Keranji adalah masyarakat yang bertempat tinggal atau yang telah berdomisili sejak tahun 1993. Rata-rata mata pencaharian mereka lebih dominan pertanian. Desa Sungai Keranji adalah desa dari sekian banyak desa yang terdapat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Desa ini berdiri pada tahun 1993. Partisipasi masyarakat Desa Sungai Keranji ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terjadi penurunan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan desa. Ini dilihat dari tahun 2008-2012.

Tabel 1.1

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

No	Tahun	Perihal	Tingkat Partisipasi Masyarakat
1	2008	Musyawarah desa mengenai rehap kantor desa	42 orang
2	2009	Musyawarah desa mengenai rehap kantor BPD	51 orang
3	2010	Musyawarah desa mengenai pembuatan pagar desa	27 orang
4	2011	Musyawarah desa mengenai pembuatan pagar desa	26 orang
5	2012	Musyawarah desa mengenai pembuatan turab beton	29 orang

Sumber : *Data Tahunan Desa Keranji*

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa dari tahun ketahun tingkat kepedulian masyarakat dalam bidang pembangunan semakin berkurang. Seharusnya masyarakat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan yang telah direncanakan untuk kemajuan desanya. Selain itu sebagian masyarakat juga enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di desa seperti gotong royong, dengan alasan beraneka ragam.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa sungai keranji.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah persepsi masyarakat tentang kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa sungai keranji.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dilapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisa dengan sistem deskriptif kualitatif dengan persentase. (Suharsimi Arikunto, 2002:209).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2013 sampai dengan Mei 2013.

Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Sungai Keranji yang mempunyai kriteria yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan Desa Sungai Keranji. Namun jika populasinya besar maka sampel yang diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Tergantung dari kemampuan peneliti dilihat dari subjek besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. (menurut Suharsimi Arikunto). Sample yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap mengetahui tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan Desa Sungai Keranji (*Purposif sampling*). Jumlah warga Desa Sungai Keranji sebanyak 2450 orang. Sehingga sampel diambil 10% dan ditetapkan sebanyak 245 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terperinci dalam menguji hipotesis maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi: Observasi, Wawancara, Angket, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dilapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisa dengan sistem deskriptif kualitatif dengan persentase, (Suharsimi Arikunto, 2002:209).

Setelah data terkumpul, maka data diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan. Sedangkan data yang berifat kuantitatif diproses dengan cara dijumlahkan lalu dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan lalu diperoleh persentase. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang diinginkan
2. Mengklasifikasikan alternative jawaban responden.

- Menentukan besar persentase alternative jawaban responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% \quad (\text{Sudijono, 2001: 40})$$

Hasil analisa dikelompokkan meneurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan. Adapun tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut:

- Apabila responden yang menjawab A (Ya) Sebesar 50,1% - 100% = Ya
- Apabila responden yang menjawab A (Ya) Sebesar 0% - 50% = Tidak

(Sutrisno Hadi, 1990: 229)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Di Desa Sungai Keranji

1. Bertanggung Jawab dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintah

Dalam urusan pemerintahan tentunya ini adalah suatu tanggung jawab pemerintah desa atau Kepala Desa. Misalnya dalam hal pembuatan Peraturan Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun Kerjasama antar Desa. Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa apakah Kepala Desa Bertanggung Jawab dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa

Tabel 4.7

Kepala Desa Bertanggung Jawab dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa

no	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	239	97,6
2.	Tidak	6	2,4
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 239 responden (97,6%) mengatakan ya, Kepala Desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Sedangkan 6 responden (2,4%) mengatakan Kepala Desa kurang berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi Kepala Desa Sungai Keranji dalam menyelenggarakan urusan pemerintah.

2. Sebagai pemimpin masyarakat Kepala Desa menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya.

Seorang Kepala Desa juga dapat mengadakan kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya atau kerjasama antar desa demi kepentingan desa masing-masing. Dalam hal ini bentuk-bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

Tabel 4.8

Kepala Desa Menjalinkan Kerjasama dengan Pimpinan Masyarakat Desa Lainnya

no	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	167	68,2
2.	Tidak	78	31,8
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 167 responden (68,2%) mengatakan ya. Sedangkan 78 responden (31,8%) mengatakan tidak, berarti Kepala Desa tidak berfungsi dalam menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya.

3. Mendamaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat lainnya.

Kepala Desa merupakan salah satu unsur pimpinan tertinggi di lingkungan pedesaan, dalam menyelesaikan konflik-konflik diwilayahnya tentu akan melalui prosedur-prosedur berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah.

Tabel 4.9

Kepala Desa Mendamaikan Perselisihan Yang Terjadi Antar Warga

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	192	78,4
2.	Tidak	53	21,6
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 192 responden (78,4%) mengatakan ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Sungai Keranji dalam mendamaikan perselisihan masyarakat lainnya sudah berjalan dengan baik, sebab 192 responden (78,4%) mengatakan ya.

Tabel 4.10

Rekapitulasi data fungsi Kepala Desa

Indikator tentang fungsi Kepala Desa	alternatif jawaban			
	ya	%	Tidak	%
Kepala Desa Bertanggung Jawab dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa	239	97,55102	6	2,44898
Kepala Desa Menjalin Kerjasama dengan Pimpinan Masyarakat Desa Lainnya	167	68,16327	78	31,83673
Kepala Desa Mendamaikan Perselisihan Yang Terjadi Antar Warga	192	78,36735	53	21,63265
Jumlah	598,00	244,08	137,00	55,92
rata-rata	199,33	48,82	68,50	18,64

Sumber:Data Olahan 2013

Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan masyarakat terhadap Kepala Desa sungai keranji dalam melaksanakan fungsinya cukup berperan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.10 sebanyak 244,08% (598 responden) mempunyai tanggapan ya.

1. Kepala Desa Mengajukan rancangan Peraturan desa

Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, Peraturan Desa ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

Tabel 4.11

Kepala Desa bertugas dalam Mengajukan Rancangan Desa mengenai APBDes

no	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	245	100
2.	Tidak	0	0

Jumlah	245	100%
--------	-----	------

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 245 responden (100%) mengatakan Ya, bahwa Kepala Desa bertugas dalam mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes.

2. Kepala Desa bertugas dalam pembentukan lembaga masyarakat

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa merupakan hal sangat penting. Bentuk Lemabaga-lembaga kemasyarakatan seperti LKMD, BPD, BKMT (badan kontak majelis tahlim) Tim penggerak PKK, RW dan RT.

Tabel 4.12

Kepala Desa Bertugas dalam Membentuk Lembaga Masyarakat

no	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	233	95,1
2.	Tidak	12	4,9
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa sebanyak 233 responden (95,1%) mengatakan Ya, Kepala Desa berperan dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan 12 responden (4,9) mengatakan tidak.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan gotong royong

Hidup bergotong royong merupakan hal yang sudah menjadi tradisi masyarakat desa. Setiap masyarakat pastinya menginginkan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, Kepala Desa mengkoordinir masyarakatnya untuk ikut serta bergotong royong.

Tabel 4.13

Usaha Kepala Desa bertugas dalam mengkoordinir masyarakatnya untuk bergotong royong

no	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	34	13,9
2.	Tidak	211	86,1
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 34 responden (13,9%) mengatakan Ya. Berarti Kepala Desa mengkoordinir masyarakatnya untuk bergotong royong. Sedangkan 211 responden (86,1%) mengatakan tidak.

4. Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan tentang penyuluhan hidup sehat.

Minimnya pendidikan masyarakat desa dapat berdampak pada kehidupan yang tidak sehat. Tetapi sarana pembuangan sampah masih jauh dari yang diharapkan.

Tabel 4.14

Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan tentang penyuluhan hidup sehat

no	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	174	71
2.	Tidak	71	29
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.14 dapat diketahui bahwa sebanyak 174 responden (71%) mengatakan Ya. Sedangkan 71 responden (29%) mengatakan bahwa Kepala Desa tidak pernah melakukan pembinaan tentang pola hidup sehat kepada masyarakat, karena Kepala Desa Sungai Keranji kurangnya sosialisasi tentang pembinaan pola hidup sehat kepada masyarakat.

5. Kepala Desa melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi.

Didesa sendiri bagaimana peran serta masyarakat dalam keterlibatannya untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, terutama ditubuh pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan desa yang telah dibuat memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Tabel 4.15

Kepala Desa melaksanakan prinsip tatapemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	189	77,1
2.	Tidak	56	22,9
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa 189 responden (77,1%) mengatakan Ya. 56 responden (22,9%) mengatakan Kepala Desa tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi.

6. Kepala Desa melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari nepotisme.

Belajar menjadi pemimpin masyarakat yang baik membutuhkan proses yang lama. Namun hal ini bisa kita mulai dengan menjalin hubungan bersama masyarakat. Seorang pemimpin masyarakat yang baik adalah yang bisa membesarkan dan memberikan semangat kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan desa.

Tabel 4.16

Kepala Desa Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Bersih dan Bebas dari Nepotisme

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	245	100
2.	Tidak	0	0
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 245 responden (100%) mengatakan Kepala Desa telah melaksanakan tata pemerintahan yang bersih dari nepotisme.

7. Kepala Desa melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang

Menjadi seorang pemimpin sangatlah tidak mudah, apalagi memimpin masyarakat yang beraneka ragam. Seorang Kepala Desa harus memiliki kemampuan dan cakap serta memiliki sifat kepemimpinan.

Tabel 4.17

Kepala Desa melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	245	100
2.	Tidak	0	0
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 245 responden (100%) mengatakan ya, Kepala Desa melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Ini dikarenakan Kepala Desa tidak pernah melanggar aturan perundang-undangan yang tercantum pada pasal 16 tentang tugas dan kewajiban kepala desa.

Tabel 4.18
Rekapitulasi data tugas Kepala Desa

Indikator tentang tugas Kepala Desa	Alternatif Jawaban			
	Ya	%	Tidak	%
Kepala Desa bertugas dalam Mengajukan Rancangan Desa mengenai APBDes	245	100	0	0
Kepala Desa Bertugas dalam Membentuk Lembaga Masyarakat	233	95,10204	12	4,897959
Usaha Kepala Desa dalam mengkoordinir masyarakatnya untuk bergotong royong	34	13,87755	211	86,12245
Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan tentang penyuluhan hidup sehat	174	71,02041	71	28,97959
Kepala Desa melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi	189	77,14286	56	22,85714
Kepala Desa Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Bersih dan Bebas dari Nepotisme	245	100	0	0
Kepala Desa melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang	245	100	0	0
Jumlah	1365	557,14	350	142,86
rata-rata	195	79,59	50	20,41

Sumber:Data Olahan 2013

Dari tabel 4.18 diatas, dapat diketahui tanggapan masyarakat terhadap Kepala Desa Sungai Keranji dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.18 rata-ratanya 79,59% mengatakan ya. Berarti persepsi masyarakat tentang tugas kepala desa sudah berjalan dengan baik. Tetapi Usaha Kepala Desa dalam mengkoordinir masyarakatnya untuk bergotong royong belum berjalan dengan baik.

1. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD.

Sebagai pemimpin masyarakat, tentunya seorang Kepala Desa memiliki visi dan misi tersendiri. Kepala Desa berhak menetapkan peraturan desa bersama BPD) dan selanjutnya peraturan tersebut harus mendapat persetujuan dari BPD.

Tabel 4.19
Kepala Desa berwenang Menetapkan Peraturan Desa yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama BPD

no	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	245	100
2.	Tidak	0	0
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat 245 responden (100%) mengatakan ya, yaitu masyarakat mengatakan Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa lalu mendapat persetujuan dari BPD.

2. Membina kehidupan kemasyarakatan desa melalui perbaikan gizi masyarakat pedesaan.

Terwujudnya masyarakat yang sehat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Penghasilan masyarakat pada umumnya bisa dikatakan sudah cukup baik. Tetapi masih ada masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata.

Tabel 4.20

Kepala Desa Wewenang Tentang Perbaikan Gizi Bagi Masyarakat

no	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	245	100%
2.	Tidak	0	0
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa sebanyak 245 responden mengatakan ya, bahwa Kepala Desa berwenang tentang perbaikan gizi bagi masyarakatnya.

3. Usaha Kepala Desa untuk mengembangkan posyandu

Mengatasi gizi buruk yang terjadi pada anak balita merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menanggulangnya.

Tabel 4.21

Kepala Desa berwenang untuk mengembangkan posyandu

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	190	77,6
2.	Tidak	55	22,4
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.21 diatas dapat dilihat bahwa 190 responden mengatakan ya. Karena Kepala Desa dapat menambah meja dan kursi untuk kegiatan posyandu. Sebanyak 55 orang mengatakan tidak ada usaha Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan posyandu.

4. Kegiatan Yang Dilakukan Posyandu Kepada Masyarakat

Kegiatan Pokok Posyandu diantaranya adalah KB (keluarga berencana), Imunisasi, Gizi, Penanggulangan diare. Selain itu Pemodelan kegiatan Posyandu Peduli TAT yang efektif lainnya dapat memantau pertumbuhan.

Tabel 4.22

Kegiatan Yang Dilakukan Posyandu Kepada Masyarakat

no	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	245	100
2.	Tidak	0	0
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa 245 responden mengatakan ada kegiatan posyandu kepada masyarakat.

5. Usaha Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan Koperasi Unit Desa

Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya.

Tabel 4.23

Usaha Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan Koperasi Unit Desa

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	43	17,6
2.	Tidak	202	82,4
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.23 diatas dapat dilihat bahwa 43 responden (17,6%) mengatakan ya, ada usaha Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan Koperasi Unit Desa. Sedangkan 202 responden (82,4%) mengatakan tidak ada usaha Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan.

6. Usaha Kepala Desa Untuk Mengkoordinasi Keamanan Dan Ketertiban Dengan Instansi Terkait

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa, maka Kepala Desa membangun poskamling dan pos polisi. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait sangat lah penting hal ini dikarenakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa.

Tabel 4.24

Usaha Kepala Desa Untuk Mengkoordinasi
Keamanan Dan Ketertiban Dengan Instansi Terkait

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	233	95,1
2.	Tidak	12	4,9
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 233 orang responden (95,1%) mengatakan ya. Bahwa ada usaha kepala desa untuk mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait. Sedangkan responden yang mengatakan tidak sebanyak 12 orang (4,9%).

7. Kepala Desa mengkoordinir masyarakatnya untuk membangun poskamling

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa maka Kepala Desa membangun poskamling (pos keamanan lingkungan). Tujuannya untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat desa.

Tabel 4.25

Kepala Desa berwenang dalam pembangunan poskamling

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	245	100
2.	Tidak	0	0
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.25 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 245 orang mengatakan ya, berarti kepala desa berwenang dalam pembangunan poskamling didesa ini.

8. Adanya Manfaat Poskamling Bagi Masyarakat Desa

Setiap pembangunan di haruskan bermanfaat untuk masyarakat desa. Dimana program Kepala Desa tentang pembangunan poskamling (pos keamanan lingkungan) adalah tujuannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun menjaga pembangunan yang telah ada.

Tabel 4.26
Poskamling sangat bermanfaat Bagi Masyarakat Desa

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	98	40
2.	Tidak	147	60
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.26 dapat dilihat bahwa sebanyak 98 responden (40%) mengatakan ya, berarti poskamling sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Sedangkan 147 responden (60%) mengatakan tidak ada manfaat dari pembangunan poskamling (pos keamanan lingkungan).

9. Wewenang Kepala Desa dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Sarana dan prasarana pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting dan juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan desa. Tanpa adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap.

Tabel 4.27
Kepala Desa Wewenang untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	245	100
2.	Tidak	0	0
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.27 dapat diketahui bahwa sebanyak 245 responden (100%) mengatakan ya. Berarti Kepala Desa memiliki kewenangan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah desa.

10. Wewenang Kepala Desa memanfaatkan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintah desa.

Seiring berjalannya waktu, maka terjadi perubahan-perubahan setiap tahunnya. Terutama pedesaan, dengan adanya program-program dari Kepala Desa maka desa semakin hari semakin maju.

Tabel 4.28
Usaha Kepala Desa untuk Memanfaatkan Teknologi Informasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	170	69,4
2.	Tidak	75	30,6
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.28 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 170 responden (69,4%) mengatakan ya. Sedangkan 75 responden (30,6%) mengatakan tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha Kepala Desa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi yang Mendukung

Penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik. Karena sebanyak 170 responden (69,4%) mengatakan ya.

11. Sarana dan Prasarana Ibadah yang Memadai

Pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang memadai merupakan hal yang harus diutamakan. Dengan adanya masjid didesa maka apabila ada kegiatan pengajian ini akan memudahkan masyarakat untuk mengadakannya.

Tabel 4.29

Sarana dan Prasarana Ibadah yang Memadai

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	245	100
2.	Tidak	0	0
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.29 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 245 responden (100%) mengatakan ya. Berarti di Desa Sungai Keranji memiliki sarana dan prasarana ibadah yang memadai. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha Kepala Desa Sungai Keranji untuk memiliki sarana dan prasarana ibadah yang mendukung sudah berjalan dengan baik.

12. Sarana dan Prasarana Olah Raga yang Memadai

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai juga merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya sarana dan prasarana olahraga ini dapat menjalin silaturahmi dengan masyarakat lainnya..

Tabel 4.30

Kepala Desa berwenang dalam meningkatkan Sarana dan Prasarana Olah Raga

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	34	13,9
2.	Tidak	211	86,1
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.30 dapat diketahui bahwa sebanyak 34 responden (13,9%) mengatakan ya. Sedangkan 211 responden (86,1%) mengatakan tidak ada usaha Kepala Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

13. Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Memadai

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembangunan desa. Karena Tanpa adanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai maka program Kepala Desa untuk mengembangkan desa agar lebih maju menjadi suram.

Tabel 4.31

Kepala Desa Wewenang untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Memadai

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	30	12,2
2.	Tidak	215	87,8
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.31 dapat diketahui bahwa sebanyak 30 responden (12,2%) mengatakan ya. Sedangkan 215 responden (87,8%) mengatakan tidak. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa Kepala Desa Sungai Keranji dalam usaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan belum berjalan dengan baik sesuai dengan pendapat responden diatas.

14. Adanya pembangunan pasar

Seiring dengan perkembangan pola pikir dan tuntutan zaman moderen, kini pasar sudah mulai membenahi diri.

Tabel 4.32

Wewenang Kepala Desa untuk meningkatkan Pembangunan Pasar

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	245	100
2.	Tidak	0	0
Jumlah		245	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Dari tabel 4.32 dapat diketahui bahwa 245 responden mengatakan ya, berarti Kepala Desa memiliki kewenangan untuk meningkatkan pembangunan pasar.

15. Adanya pembangunan Balai Desa

Melihat fungsi dan manfaat balai desa sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan didesa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4.33

Usaha Kepala desa untuk meningkatkan pembangunan balai desa

No	Pilihan jawaban	F	%
1.	Ya	0	0
2.	Tidak	245	100
Jumlah		245	100%

Sumber:Data Olahan 2013

Dari tabel 4.33 dapat diketahui bahwa 245 responden (100%) mengatakan tidak, berarti tidak ada usaha kepala desa untuk meningkatkan pembangunan balai desa. Balai desa dari tahun ketahun tidak pernah sekalipun direnovasi.

Tabel 4.34

Rekapitulasi tentang wewenang kepala desa

Indikator tentang wewenang Kepala Desa	alternatif jawaban			
	Ya	%	Tidak	%
Kepala Desa berwenang Menetapkan Peraturan Desayang Telah Mendapat Persetujuan Bersama BPD	245	100	0	0
Kepala Desa Wewenang Tentang Perbaikan Gizi Bagi Masyarakat	245	100	0	0
Kepala Desa berwenang untuk mengembangkan posyandu	190	77,55102	55	22,44898
Kegiatan Yang Dilakukan Posyandu Kepada Masyarakat	245	100	0	0
Usaha Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan Koperasi Unit Desa	43	17,55102	202	82,44898
Usaha Kepala Desa Untuk Mengkoordinasi Keamanan Dan Ketertiban Dengan Instansi Terkait	233	95,10204	12	4,897959

Kepala Desa berwenang dalam pembangunan poskamling	245	100	0	0
Poskamling sangat bermanfaat Bagi Masyarakat Desa	98	40	147	60
Kepala Desa Wewenang untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa	245	100	0	0
Usaha Kepala Desa untuk Memanfaatkan Teknologi Informasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Desa	170	69,38776	75	30,61224
Sarana dan Prasarana Ibadah yang Memadai	245	100	0	0
Kepala Desa berwenang dalam meningkatkan Sarana dan Prasarana Olah Raga	34	13,87755	211	86,12245
Kepala Desa berwenang untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Memadai	30	12,2449	215	87,7551
Wewenang Kepala Desa untuk meningkatkan Pembangunan Pasar	245	100	0	0
Usaha Kepala desa untuk meningkatkan pembangunan balai desa	0	0	245	100
Jumlah	2513	1025,71	1162	474,29
rata-rata	167,53	68,38	77,47	31,62

Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel 4.34 diatas, dapat diketahui tanggapan masyarakat terhadap Kepala Desa sengai keranji dalam melaksanakan wewenangnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.36 rata-rata 68,38% yang menjawab ya, berarti Kepala Desa sangat berperan dalam melaksanakan wewenangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Persepsi masyarakat tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Sungai Keranji adalah sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya tanggapan masyarakat bahwa Kepala Desa Sungai Keranji dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sudah berjalan dengan baik.

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah “**Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Di Desa Sungai Keranji Belum Berjalan Dengan Baik**” maka berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan baik melalui wawancara, observasi, kepustakaan dan angket ditolak.

Saran

Dari uraian di atas, adapun saran yang disampaikan penulis kesemua pihak adalah sebagai berikut:

- Untuk Kepala Desa Sungai Keranji, agar meningkatkan koordinasi antar warga secara rutinitas supaya terjalin suatu hubungan yang erat antara pimpinan dengan bawahan.
- Untuk Mahasiswa, dengan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan pemerintahan baik pemerintahan Desa maupun pemerintah daerah.

- Bagi semua pihak yang membaca tulisan ini dapat dijadikan acuan dan bahan referensi penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen Undang- Undang Pemerintahan Daerah 2008*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erlinda, Sri. 2008. *Kajian Masyarakat Indonesia*, Pekanbaru : Cendikia Insani
- Erlinda, Sri. 2009. *Sosiologi Politik*: Pekanbaru : Cendikia Insani
- Kartina, 2002. *Pengaruh Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa yang Demokratis Terhadap Dukungan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Benayah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak*. Pekanbaru : Universitas Riau
- Sandhy, N,H. 2012 *Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKN FKIP Universitas Riau Terhadap Peranan Agen Sosialisasi Politik*. Pekanbaru.
- Widjaja. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa* , Jakarta: PT Raja Gravindo Persada 114 Hal
- Yeli, S. 2007. *Imajinasi dan Peranannya Terhadap Persepsi*. Pekanbaru: SUSKA Press.